

Lembar Gender Analysis Pathway (GAP)

SKPD : BPKAD Prov.Kaltim

Semester I, 2026 Peran BPKAD Prov. Kaltim dalam Pengarusutamaan Gender pada Penyaluran Bankeu Infrastruktur

Kebijakan/Program /Kegiatan	Isu Gender			Kebijakan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
	Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Indikator Gender
Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8
Program : PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1. Pemanfaatan Bankeu dalam pembangunan infrastruktur kota Samarinda pada tahun 2026 sebesar Rp311.663.156.697	Akses : Masih terbatasnya dalam mengakses informasi pengusulan dan perencanaan infrastruktur Bankeu, sehingga kebutuhan spesifik kelompok rentan belum terakomodasi optimal	Penyebarluasan informasi terkait kebijakan mekanisme pengusulan Bantuan Keuangan (Bankeu) infrastruktur masih belum optimal serta belum menjangkau seluruh pemangku kepentingan secara merata, terutama perempuan dan kelompok rentan.	Belum adanya kebijakan internal yang mewajibkan keterwakilan kelompok rentan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, serta belum diterapkannya indikator infrastruktur yang responsif terhadap	Mewujudkan pembangunan infrastruktur dan akses informasi yang inklusif melalui pemanfaatan Bantuan Keuangan (Bankeu) untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan di Kalimantan Timur	1. Meningkatkan keterlibatan perempuan dan kelompok rentan dalam proses pengambilan keputusan terkait perencanaan pembangunan infrastruktur. 2. Mengintegrasikan indikator pembangunan infrastruktur yang responsif gender dan inklusif terhadap	Alokasi bantuan keuangan tahun 2026 kota Samarinda sebesar Rp311.663.156.697 Output : Jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan

Kebijakan/Program /Kegiatan	Isu Gender				Kebijakan Rencana Aksi			Pengukuran Hasil	
	Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)	Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Indikator Gender	
Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9	
				kelompok rentan dalam penilaian kegiatan		kelompok rentan dalam proses penilaian serta pelaksanaan kegiatan.			
Kegiatan : Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2. Penggunaan anggaran bankeu pada tahun 2026 di Kalimantan Timur, Samarinda berjumlah 96 titik lokasi, dengan besaran dana Rp311.663.156.697	Partisipasi : Masih rendanya dalam mengikutserta kan kelompok rentan						Outcome : Meningkatnya tingkat keselarasan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah dalam mendukung tata kelola yang efektif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.	

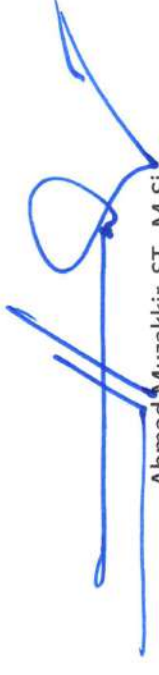
Kebijakan/Program /Kegiatan	Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)	Isu Gender			Kebijakan Rencana Aksi			Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Indikator Gender	
Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9	
Sub Kegiatan : Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	3. Perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan terfokus pada pembangunan infrastruktur seperti, peningkatan saluran drainase, peningkatan jalan, dan pengadaan/pemasangan tanki septik	Kontrol : Pengambilan keputusan terkait jenis dan lokasi pembangunan infrastruktur Bankeu belum tepat sasaran						Dampak : Pengambilan keputusan yang tepat sasaran meningkatkan efektivitas pembangunan, memperluas manfaat pembangunan bagi perempuan dan kelompok rentan, serta mendorong pemerataan akses terhadap layanan dasar secara lebih adil dan inklusif di seluruh wilayah.	
Tujuan Kegiatan : Pemanfaatan bankeu dalam pembangunan infrastruktur dan fasilitas daerah	4. Salah satu tugas dari BPKAD yaitu menjadi tim Driver PUG Kaltim sekaligus menjadi tim TAPD sehingga	Manfaat : Pembangunan infrastruktur dari Bankeu belum dirasakan							

Kebijakan/Program /Kegiatan	Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)	Isu Gender			Kebijakan Rencana Aksi			Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Indikator Gender	
Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9	
guna mensejahterakan kelompok rentan (lansia,ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak, disabilitas, dan perempuan)	memiliki fungsi untuk mengawal ARG Kaltim	secara setara oleh wanita maupun kelompok rentan							
Sasaran : Pemerintah Kota Kalimantan Timur	Adanya Permendagri 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan pengarusutamaan Gender di Daerah, Keputusan Gubernur tentang penggerak PUG Kaltim No. 463/K.238/2019 Perda No. 5 Tahun 2024 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah								

Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI		
Sasaran Program	Pemerintah Kota Kalimantan Timur		
Kegiatan	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		
Sub Kegiatan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		
Latar Belakang	Dasar Hukum		Permendagri 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan pengarusutamaan Gender di Daerah, Keputusan Gubernur tentang penggerak PUG Kaltim No. 463/K.238/2019 Perda No. 5 Tahun 2024 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah
			Belum optimalnya pengakomodasian kebutuhan spesifik kelompok rentan dalam perencanaan dan pemanfaatan pembangunan infrastruktur, sehingga perlu dioptimalkan fungsi dan manfaat dari bantuan keuangan terhadap kelompok rentan
	Gambaran Umum		Rencana aksi yang dilakukan yaitu: 1. Meningkatkan keterlibatan perempuan dan kelompok rentan dalam proses pengambilan keputusan terkait perencanaan pembangunan infrastruktur. 2. Mengintegrasikan indikator pembangunan infrastruktur yang responsif gender dan inklusif terhadap kelompok rentan dalam proses penilaian serta pelaksanaan kegiatan.
Sub Kegiatan	Uraian Kegiatan		1. Tahapan Kegiatan: Target capaian pemanfaatan bantuan keuangan diarahkan secara adil dan setara dengan memperhatikan kebutuhan spesifik perempuan serta kelompok rentan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara inklusif oleh seluruh masyarakat. 2. Sasaran: Penyebarluasan informasi terkait kebijakan dan mekanisme pengusulan Bantuan Keuangan (Bankeu) infrastruktur masih belum

		optimal serta belum menjangkau seluruh pemangku kepentingan secara merata, terutama perempuan dan kelompok rentan. 3. Penerima Manfaat: Masyarakat/kelompok rentan
	Indikator Kinerja	Melakukan sosialisasi dan mengakomodasi kebutuhan kelompok rentan dalam penyusunan rencana pembangunan infrastruktur
	Batasan Kegiatan	Melakukan sosialisasi dan melibatkan partisipasi kelompok rentan dalam pengambilan keputusan dalam menentukan rencana pembangunan infrastruktur
Maksud dan Tujuan	Melibatkan kelompok rentan dalam proses pengambilan keputusan terkait perencanaan pembangunan infrastruktur yang didanai melalui Bantuan Keuangan (Bankeu), sehingga fasilitas yang dibangun dapat memenuhi kebutuhan, meningkatkan aksesibilitas, serta memberikan manfaat yang setara bagi seluruh kelompok masyarakat.	
Cara Pelaksanaan Sub Kegiatan	Non Pengadaan	
Tempat Pelaksanaan Sub Kegiatan	Samarinda, Kalimantan Timur	
Pelaksanaan & Penanggung Jawab Sub Kegiatan	Kepala Badan selaku Pengguna Anggaran dan Bidang Anggaran	
Jadwal	Disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan dari bidang	
Biaya	Rp311.663.156.697	

Samarinda, 20 Mei 2026
Kepala BPKAD Prov. Kaltim u


Ahmad Muzakkir, ST., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19751001 200112 1 003